

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akhir tahun 2019 menjadi tahun bersejarah dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Terutama di bidang kesehatan, yang juga mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Pada tahun ini terjadi penyebaran sebuah virus yang diketahui sudah ada pada akhir tahun 2019 sehingga virus ini dinamakan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan menjadi sebuah pandemi karena penyakit ini menyerang hampir seluruh negara yang ada di dunia. Virus ini mulai diketahui sudah menyebar hingga ke Indonesia sejak awal Maret tahun 2020. Berawal dari dinyatakan ada 2 orang warga negara Indonesia yang positif terjangkit *covid 19* tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Kasus baru mengenai covid-19 hampir setiap harinya terjadi peningkatan secara signifikan. Ada kepanikan di tengah-tengah masyarakat karena diketahui virus ini sangat mematikan. Banyak pernyataan dan pemberitaan baik melalui televisi maupun media sosial akibat virus ini, sudah ribuan hingga jutaan orang meninggal dari berbagai belahan dunia (Poltak Partogi Nainggolan, 2020).

Corona virus disease 2019 (Covid 19) bisa menular dari kontak fisik orang ke orang lain. Sehingga masyarakat dihimbau untuk menghindari kerumunan. Masyarakat juga dihimbau oleh pemerintah untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah (karantina). Dengan situasi ini banyak tempat-tempat yang tutup untuk mencegah penyebaran virus ini. Misalnya saja pasar, mall, cafe, toko, hotel, tempat wisata, perusahaan, sekolah, kampus dan masih banyak lagi tempat yang tutup

sebagai langkah untuk menghentikan penyebaran dari *covid 19*. Dengan tutupnya beberapa tempat tersebut, tentu roda perekonomian masyarakat menjadi terkendala dan menurun. Dampaknya mengakibatkan pengaruh diberbagai aspek, serta mempengaruhi banyak negara, salah satunya Indonesia (Burhanuddin, Makassar, Abdi, & Makassar, 2020).

Aktivitas yang dihentikan dalam kurun waktu yang belum ditentukan membuat masyarakat banyak mengeluh karena sudah tidak memiliki pendapatan. Karyawan-karyawan juga banyak mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan ataupun pemberi kerja sudah tidak sanggup lagi membayar gaji karyawan. Kebutuhan hidup yang tidak bisa dihindari membuat masyarakat mengeluh dan meminta solusi terbaik dari pemerintah. Salah satu keluhan yang tidak dapat dihindari masyarakat adalah dalam pembayaran uang sekolah anak-anaknya. Walaupun tempat sekolah ditutup untuk menghindari penyebaran *covid 19* namun proses belajar mengajar tetap berlangsung secara *daring* atau *online* dengan melalui empat jenis media yang dimasukkan dalam sistem belajar mengajar adalah audio, video, teks, dan slide (Riza, Nugraha, Herbert, & Wibawa, 2017).

Di kota Batam sendiri yang menjadi salah satu kota di kepulauan Riau sangat merasakan imbas dari pandemi di tahun 2020 ini. Banyak perusahaan, mall, hotel dan tempat umum lainnya ditutup. Padahal dari tempat tersebutlah masyarakat bisa mendapatkan penghasilan. Misalnya saja orang-orang yang membuka toko di mall, tentu dengan tutupnya mall, toko pun ikut ditutup. Masyarakat yang penghasilannya hanya berasal dari jualannya di toko bingung mau mencari penghasilan dari mana, sedangkan pemerintah juga menghimbau supaya masyarakat tetap berada di dalam

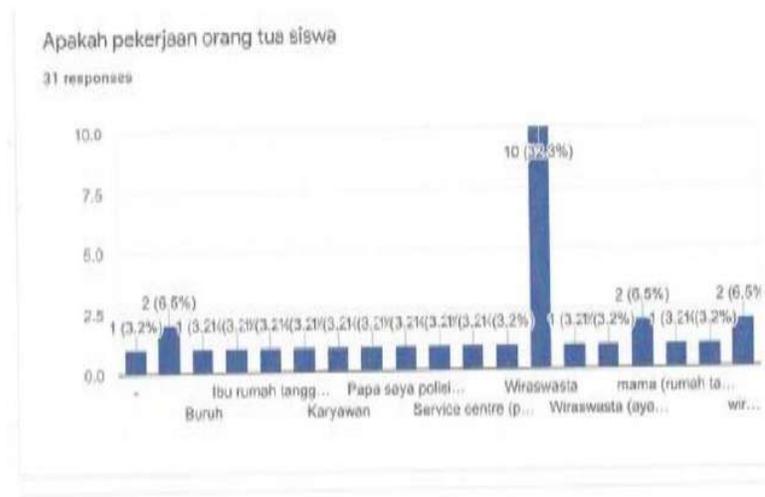
rumah dan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di luar rumah maupun tempat-tempat umum. Belum lagi ratusan karyawan di perusahaan, mall dan hotel yang diberhentikan sementara waktu, karena gajinya tidak dibayarkan lantaran tidak ada aktivitas kerja seperti biasanya.

Banyak kendaraan atau transportasi juga tidak beroperasi selama pandemi *covid 19*. Transportasi darat, laut dan udara banyak yang tidak diizinkan beroperasi oleh pemerintah daerah setempat. Pelabuhan dan bandara juga ditutup. Langkah ini diambil untuk mengurangi dan mencegah penyebaran *covid 19*. Pengaruh ini juga sangat dirasakan oleh masyarakat yang penghasilannya dari sana. Situasi ini sangat melumpuhkan ekonomi masyarakat baik di dalam maupun di luar negara Indonesia. Kegiatan ekonomi dan transportasi memiliki hubungan sangat dekat, sehingga keduanya dapat mempengaruhi satu sama lain (Asmawi, Sjoraida, & Anwar, 2017).

Orang tua siswa menjadi dilema dalam situasi ini, ada yang tidak memiliki pendapatan dan kehilangan pekerjaan sehingga kesulitan dalam pembayaran uang sekolah atau Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP). Sedangkan orang tua juga berharap anak-anaknya tetap bisa bersekolah dan mengikuti kegiatan/ proses belajar meskipun secara *daring*. Namun situasi pandemi ini masyarakat tidak bisa beraktivitas di luar rumah dan hampir seluruh masyarakat, kondisi ekonominya terancam. Adapun konsep Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) maupun belajar secara *daring* yaitu pembelajaran yang menggunakan media sehingga memungkinkan terjadinya interaksi guru atau pengajara dengan peserta didik atau pelajar (Arief Rachman Badrudin, Muhammad Hidayat Ginanjar, 2020).

Kenyataan yang tidak bisa dihindari roda perputaran ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 ini juga sangat dan bisa dipengaruhi oleh beberapa dampak yang bisa ditimbulkan melalui penyebaran virus *covid 19*. Dengan kecepatan respon dalam menanggulangi pandemi ini. Pemerintah yang sudah melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti tindakan penutupan sekolah, *work of home*, ditunda dan dibatalkannya berbagai *event* baik dipemerintahan maupun swasta, membuat roda perputaran ekonomi melambat. Seperti halnya di Provinsi Banten, dimana dampak covid-19 berpengaruh terhadap lesunya perekonomian daerah sehingga sektor penerimaan daerah mengalami penurunan (Sanjaya, 2020).

Sebagian besar banyak orang tua/ wali murid bekerja di luar negeri, terutama di negara tetangga Indonesia khususnya Kepulauan Riau yaitu Singapore dan Malaysia. Tetapi dengan pandemi *covid 19* hampir seluruh negara yang ada di dunia memberlakukan sistem karantina dan *lock down* termasuk negara Singapore dan Malaysia. Karantina merupakan salah satu sistem, dimana sistem ini mencegah terjadinya perpindahan orang maupun barang pada periode tertentu supaya mencegah penularan penyakit. Cara karantina terhadap seseorang atau suatu benda yang akan memasuki suatu negara kota wilayah dilakukan dengan sangat ketat. Dalam masa karantina, biasanya di wilayah di sekitar pelabuhan atau bandara, dilakukan pemantauan dan penjagaan serta pemeriksaan kesehatan. Masa karantina berakhir bila situasi sudah kembali kondusif dan yang pasti telah diperoleh informasi yang akurat. Karantina dan *lock down* ini sangat mempengaruhi pendapatan atau penghasilan orang tua/ wali murid. Orang tua siswa lebih banyak bekerja sebagai wiraswasta, sehingga dampak terhadap penghasilan sangat terasa.



Gambar 1.1 Pekerjaan orang tua siswa

Sebagai wiraswasta, orang tua siswa banyak yang mengeluh karena ada yang diberhentikan bekerja untuk sementara waktu, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perusahaan tutup, dan ada juga yang masih bekerja namun tidak menerima hak (gaji) penuh seperti biasa. Ada juga orang tua siswa yang bekerja sebagai pengusaha. Para pengusaha juga mengeluh akibat pendapatan atau omset yang diperoleh tidak seperti biasanya. Dengan pekerjaan yang tidak memberi jaminan terhadap kebutuhan termasuk dalam pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP).

Situasi yang hampir tidak terkontrol membuat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah harus segera mengambil tindakan untuk pencegahan penyebaran virus ini dan tetap menjamin kelangsungan hidup dari masyarakat Indonesia. Selama masa pandemi *covid 19* banyak kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Dalam prakteknya peraturan kebijakan dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk yaitu keputusan, instruksi, edaran, pengumuman (Ryanto,

2015). Bila dijabarkan mulai dari keputusan presiden, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri sampai ke surat edaran. Salah satu edaran yang dikeluarkan adalah surat edaran Gubernur Kepulauan Riau tentang pembebasan, keringanan dan bantuan pendanaan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pencegahan penyebaran *covid 19* di provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 pada masa pandemi *Corona Virus Disaease 2019* berfokus pada poin ke 2, Gubernur Kepulauan Riau mengambil kebijakan bahwa **“Untuk SMAS/SMKS/MAN/SLBS agar memberikan keringanan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) kepada peserta didik dalam bulan April, Mei dan Juni 2020“**. (Indonesia, 2011). Di dalam surat edaran ini pada poin ke 2 jelas ditujukan bagi sekolah-sekolah swasta yang ada di Kepulauan Riau terkhusus untuk SMAS/SMKS/MAN/MAS/SLBS termasuk Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Ananda Batam. SMAS Ananda Batam adalah salah satu sekolah yang ada di Kepulauan Riau dan berada di bawah naungan Yayasan Cipta Karya Ananda atau Sekolah Ananda Batam yang didirikan pada tahun 1992. Yayasan Cipta Karya Ananda atau Sekolah Ananda Batam tunduk pada undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dikarenakan Sekolah Ananda Batam adalah salah satu badan hukum yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia dan harus tunduk pada peraturan perundang-undang yang berlaku atau hukum positif di Indonesia. Dikeluarkannya surat edaran ini sangatlah wajar untuk mengurangi beban para orang tua siswa yang terdampak pandemi *covid 19* di Provinsi Kepulauan Riau dan secara khusus di kota Batam yang sering disebut

sebagai kota industri. Terlebih juga dikarenakan situasi yang terjadi di tahun 2020 yang cukup mengagetkan seluruh masyarakat di dunia terutama dibidang ekonomi.

Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam mengeluarkan surat pemberitahuan yang ditujukan bagi sekolah swasta yang ada di kota Batam. Nomor 745/419.1/DISDIK/IV/2020 perihal keringanan biaya sekolah bagi peserta didik kurang mampu pada sekolah swasta. Dampak penyebaran *covid 19* di kota Batam, mendukung SE Gubernur Kepri mengenai pemberian keringanan uang sekolah. Merujuk ke SE Gubernur Kepulauan Riau dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Sekolah Ananda Batam mengeluarkan kebijakan untuk memberikan keringanan uang Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) bagi jenjang-jenjang Sekolah yang ada di bawah naungannya termasuk jenjang Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Ananda Batam.

Ketua Yayasan Cipta Karya Ananda/ Sekolah Ananda Batam mengeluarkan kebijakan yang menunjukkan bahwa Sekolah Ananda Batam tunduk pada kebijakan lembaga pemerintah yang ada di atasnya. Kebijakan tersebut dikeluarkan melalui surat pemberitahuan ataupun pengumuman dengan Nomor 028/Peng/109.7/YYS.AN.IV/2020, Nomor 031/Peng/109.7/YYS.AN/IV/2020, dan Nomor 032/Peng/109.7/YYS.AN/IV/2020. Kebijakan yang diambil adalah dengan memberikan potongan uang SPP bagi siswa-siswi SMAS Ananda yang memiliki saudara kandung di jenjang TK-SD maupun SMP Ananda Batam. Potongan yang diberikan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya yaitu bulan April, Mei dan Juni 2020. Begitu juga sebaliknya, bagi siswa-

siswi jenjang TK, SD dan SMP yang memiliki saudara kandung di masing-masing tingkat jenjang yang ada, akan mendapat keringanan uang SPP sesuai kebijakan tersebut.

Ketua Yayasan Sekolah Ananda Batam sudah berpartisipasi, memperhatikan dan mengikuti kebijakan Gubernur Kepulauan Riau dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam. Tetapi bagi sebagian masyarakat termasuk siswa dan orang tua siswa menganggap kebijakan tersebut tidak memberikan suatu keadilan terhadap mereka yang tidak memiliki saudara kandung yang menempuh pendidikan di Sekolah Ananda. Mereka menganggap kebijakan itu tidaklah bijaksana dan SE Gubernur Kepulauan Riau serta Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam tentang keringanan uang SPP tidaklah sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh Yayasan Sekolah Ananda Batam.

Sejumlah wali murid di Sekolah Ananda meminta Sekolah Ananda memberikan keringanan pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) selama pandemi *covid 19*. Bahkan ada yang meminta uang SPP ditiadakan selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Alasan mereka dikarenakan anak belajar dari rumah dan tidak menggunakan fasilitas sekolah seperti penggunaan daya listrik dan air. Biasanya setiap ruangan anak dilengkapi dengan fasilitas dampak corona tidak hanya bersifat ekonomi melainkan juga mempengaruhi kegiatan belajar mengajar yang kebanyakan dilakukan di rumah. Dengan diberlakukannya kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dilaksanakan secara *online*, orang tua siswa/ wali murid mengeluh karena pengeluaran mereka bertambah dengan pembelian kuota internet. Disamping itu ada keuntungan yang

didapat saat pembelajaran *Daring*, yaitu menyadarkan orang tua murid bahwa menjadi seorang guru tidaklah mudah (Didik Haryadi Santoso, 2020).

Pertimbangan lainnya, adalah dengan dilaksanakannya belajar di rumah menjadikan biaya yang dikeluarkan oleh pihak sekolah juga semakin berkurang. Namun tidak ada pengurangan bagi pembayaran uang SPP. Banyak orang tua siswa yang mengeluh dan mengadu kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam. Tidak bisa dipungkiri bahwa aparaturnegara sebagai instrumen utama pemerintah melaksanakan tugas pemerintah dalam keseharian, (Utama, 2017). Orang tua sangat menyayangkan kebijakan dari Yayasan Sekolah Ananda untuk keringanan SPP. Keluhan para orang tua murid semakin menjadi-jadi, mereka menganggap sekolah tidak mau mengerti keadaan ekonomi mereka. Bahkan masyarakat memberi asumsi bahwa sekolah sudah dijadikan tempat bisnis, untuk mendapatkan keuntungan besar di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Para anggota DPRD yang ada di lingkungan pemerintah Kepulauan Riau mengambil tindakan dengan mengadakan rapat dengar pendapat (RDP). Rapat tersebut dilakukan dengan melayangkan surat undangan dan melakukan pemanggilan kepada masing-masing pihak. Namun hingga masa new normal mulai diberlakukan, masalah keringanan uang SPP ini belum ada solusinya. Berdasarkan ilmu hukum, pemerintah harus mempertimbangkan hukum dan hak asasi manusia sebagaimana diatur UUD 1945 konstitusi dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia (Syahrin, 2017).

Di sisi lain setiap sekolah swasta juga tidak sembarangan mengambil kebijakan di masa pandemi ini. Berhubung dampaknya sangat berpengaruh bagi

ekonomi. Kebijakan yang diambil oleh Ketua Yayasan Sekolah Ananda tentu sudah mempertimbangkan berbagai hal. Beberapa strategi diambil dan diterapkan selama pandemi *covid 19*. Tidak sembarangan mengambil kebijakan, untuk mempertahankan kelangsungan operasional sekolah juga butuh biaya yang besar. Terutama Sekolah Ananda merupakan sekolah swasta yang sumber penerima dana utamanya adalah dari uang SPP siswa. Salah satunya melakukan kewajiban membayar gaji guru, tenaga kependidikan, staf/ pegawai yang bekerja di lingkungan Yayasan Sekolah Ananda. Apalagi proses kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung walaupun secara *daring/ online*. Para guru dan tenaga kependidikan juga berharap tidak ada keterlambatan gaji dan pemotongan gaji akibat pandemi *covid 19*.

Masalah kebijakan memang banyak menuai pro dan kontra terlebih bagi siapa kebijakan itu ditujukan. Banyak perbandingan yang dilakukan oleh masyarakat terutama orang tua/ wali murid yang pasti membawa keuntungan dan kerugian bagi pemberi kebijakan. Para orang tua membandingkan kebijakan Sekolah yang satu dengan Sekolah-sekolah swasta lainnya yang ada di kota Batam selama masa pandemi *covid 19*. Mereka berharap benar-benar ada keringanan yang nyata bagi pembayaran SPP. Mereka berharap setiap peraturan maupun kebijakan yang dibuat oleh instansi pemerintah apabila tidak ditaati maka ada konsekuensinya atau sanksi hukumnya karena suatu rencana yang telah ditetapkan, tetapi hasilnya tidak sesuai tujuan dari rencana tersebut, maka tentu ada masalah (Sugiyono, 2014).

Pandemi *covid 19* memang menimbulkan banyak masalah bagi masyarakat, daerah dan negara. Dengan ini masyarakat mengharapkan peran pemerintah untuk

memberikan solusi terbaik ditengah-tengah pandemi *covid 19* ini. Indonesia sebagai negara hukum harus bisa menjadikan hukum menjadi mekanisme bersama dan bisa memungkinkan adanya berbagai partisipasi masyarakat indonesia di dalam setiap prosesnya, berdasarkan ini hukum tak akan lagi dipandang masyarakat sebagai norma, melainkan lebih jauh dari itu hukum dijadikan sebagai mekanisme menyelesaikan konflik secara damai. Supaya kebijakan dapat yang didasarkan pada setiap keputusan dan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Pelaksanaan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak terlepas dari peran dan partisipasi masyarakat. Setiap kebijakan perlu ditinjau hasil pelaksanaannya sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan kedepannya. Ada kebijakan yang terlaksana sesuai harapan pejabat yang membuat kebijakan, ada juga kebijakan yang terlaksana sesuai harapan masyarakat yang mematuhi kebijakan tersebut. Begitu sebaliknya, kadang ada kebijakan yang tidak terlaksana sesuai harapan pejabat yang membuat kebijakan dan juga tidak sesuai harapan masyarakat.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, menurut penulis penting untuk dikaji terkait masalah tersebut, dan penulis mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SURAT EDARAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 420/531.1/DISDIK.SET/2020 PADA MASA PANDEMI COVID 19”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang telah diuraikan dilatar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran Gubernur surat edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 tentang pembebasan, keringanan, dan bantuan pendanaan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona disease di provinsi kepulauan riau. Serta dampak Pandemi *Covid 19* bagi Sekolah Ananda Batam.
2. Kesulitan orang tua/wali murid dalam pembayaran uang SPP yang diakibatkan oleh lemahnya perekonomian.
3. Pengambilan kebijakan oleh Sekolah Ananda Batam mengenai peringanan uang SPP pada bulan April, Mei dan Juni 2020 (masa pandemi covid 19).

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak jauh dari tujuan maka penulis akan membatasi permasalahan. Adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan surat edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 pada masa pandemi *covid 19* di sekolah ananda batam.
2. Kebijakan sekolah ananda batam dalam melaksanakan surat edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020.
3. Tindakan orang tua/wali murid dalam menyikapi kebijakan Sekolah Ananda Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Di dalam penelitian ini, ada beberapa rumusan masalah yang akan peneliti angkat, antara lain :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 pada masa pandemi *Covid 19* di SMA Ananda Batam?
2. Apakah hambatan pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 pada masa pandemi *Covid 19*?
3. Apakah solusi dalam pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 pada masa pandemi *Covid 19*?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui efektivitas pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 di masa pandemi *Covid 19*.
2. Mengetahui hambatan pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 pada masa pandemi *Covid 19*.
3. Memberi solusi pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 pada masa pandemi *Covid 19*.

1.6 Manfaat penelitian

Beberapa manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- Memberi sumbangan pemikiran bagi instansi pemerintah dalam membuat peraturan ataupun kebijakan yang harus memperhatikan hak-hak masyarakat.

- Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan surat edaran gubernur serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara mengambil kebijakan yang adil bagi penerima kebijakan.
- Sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah dalam mengambil kebijakan di dalam keadaan mendesak yang melibatkan ekonomi warga sekolah.